

RINGKASAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan informal seperti bosisme masih mampu berkuasa di tengah agenda penguatan demokrasi secara institusional terutama dalam konteks aras lokal. Pengalaman yang terjadi di KabupatenTulungagung menunjukkan bahwa hal tersebut dimungkinkan terjadi karena setidaknya beberapa hal. *Pertama*, struktur politik daerah yang terbukti masih dipegang oleh lapisan kekuatan-kekuatan lama yang dipupuk di era orde baru seperti para birokrat senior maupun pengusaha di masa orde baru. Jaringan-jaringan informal yang selama era orde baru cenderung termarginalkan atau tidak nampak dipermukaan tersebut perlahan mampu muncul dan berhasil menangkap lembaga-lembaga negara.

Kedua, dominasi kekuatan lama ini berkembang bersamaan dengan proses kontrol terhadap basis partai politik. Mereka mampu mengambil peran yang secara kuat mempengaruhi proses demokrasi lokal. Penguasaan pada basis pendukung partai kemudian berkelindan dengan basis sosial yang didominasi oleh para bos, yakni botoh. Dengan hal itu, maka struktur politik yang dimiliki oleh para bos dalam kepentingan elektoral begitu mudah dijalani. *Ketiga*, pertumbuhan kapitalisme lokal yang masih menunjukkan ketergantungan dengan pemerintah daerah. Melalui itu, mereka berhasil membangun aliansi predatori dengan karakter patronase yang berbasiskan akses kepada kekuasaan dan sumber daya negara. Ini merupakan strategi yang digunakan untuk merawat jaringan dan menjadi kohesi jaringan untuk memastikan aliansi dapat terus bertahan.

Tesis ini juga menjelaskan bahwa kekuasaan bosisme lokal mampu melampaui rintangan institusional terutama dalam konteks elektoral. Sebagaimana gambaran penelitian ini, persoalan hukum yang sejatinya dapat berpotensi dalam menggerus dukungan masyarakat terhadap para elit dalam pemilihan terbukti tidak bekerja dalam kerangka kekuasaan bosisme. Hal ini disebabkan setidaknya oleh tiga faktor utama yang memungkinkan hal itu, yakni *pertama* politik uang. Penguasaan basis material yang diperoleh dari mobilisasi proyek-proyek negara telah memungkinkan para bos dalam menjalankan praktik politik uang baik pada level masyarakat maupun dalam level sejumlah pejabat daerah.

Kedua, dominasi dan sub-ordinasi lapisan birokrat daerah atau mobilisasi aparat negara juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya tahan kekuasaan bosisme dalam rintangan institusional. Subordinasi yang dibangun dengan relasi diadik dalam nuansa patron klien telah memberikan dukungan besar terhadap para bos dalam memenangkan pemilihan. *Ketiga*, adalah politik penyertaan para bos yang telah melemahkan perkembangan kekuatan masyarakat sipil dan justru menjadi basis sosial utama dukungan bagi proses pemenanganya.

SUMMARY

This study shows that informal forces such as bossism can still rule amid the agenda of strengthening democracy institutionally, especially at the local level. The experience that occurred in the Tulungagung Regency shows that this is possible for at least some reasons. First, the regional political structure is still held by expanding old forces nurtured in the New Order era, such as senior bureaucrats and businessmen during the New Order era. During the New Order era, tended to be marginalized or did not appear to be established were slowly able to emerge and succeed in capturing state institutions.

Second, the domination of the old forces developed in parallel with controlling the political party base. They can take on roles that powerfully influence the local democratic process especially deeply. Mastery based on party support is then intertwined with a social base dominated by bosses, namely *botoh*. With this, the political structure of the bosses in electoral interests is straightforward to live with. Third, the growth of local capitalism still shows dependence on local governments. They succeeded in building predatory alliances with a patronage character based on access to state power and resources. It is a strategy used to nurture the network and provide network cohesion to ensure the alliance can survive.

This thesis also explains that the power of local bossism can transcend institutional barriers, especially in the electoral context. As an illustration of this research, legal issues that actually have the potential to erode community support for elites in elections are proven not to work within the framework of bossism. It is caused by at least three main factors that make it possible, first money politics. Mastery of the material basis obtained from the mobilization of state projects has enabled bosses to carry out money politics practices both at the community level and at the level of local officials.

Second, the domination and subordination of the regional bureaucrats or the mobilization of state apartments also influence the endurance of the power of bossism against institutional barriers. The subordinates that were built with sister relations in the client's patron nuance have given great support to bosses in winning elections. Third, it is the politics of inclusion of the bosses which have weakened the development of the power of civil society and have instead become the leading social base of support for the winning process.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kekuatan bosisme lokal yang melatarbelakangi kemenangan Syahri Mulyo sebagai tersangka korupsi dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Tulungagung. Menggunakan kerangka utama teori *local bossime* dipadu dengan konsep elit lokal predatori penelitian ini membuktikan bila kemenangan calon korupsi tidak hanya ditentukan oleh perilaku pemilih dari masyarakat, namu lebih dari itu disebabkan oleh kekuasaan yang ditunjukkan oleh para bosisme. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan paradigma *critical inquiry* yang menolak rasionalitas masyarakat dan berbagai inovasi kelembagaan membentuk corak elektoral, alih alih ditentukan corak pertarungan kepentingan segelintir elit. Berdasarkan itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kemenangan Syahri Mulyo dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung 2018 lalu disebabkan oleh, *pertama* bekerjanya jaringan lama broker politik (botoh) dalam pemilihan; *kedua*, penguasaan terhadap basis akar rumput partai; *ketiga* melakukan aliansi dengan kelompok bisnis sebagai sumber pendanaan; *keempat* bekerjanya politik uang dalam pemilihan; *kelima* melakukan mobilisasi terhadap lapisan birokrasi daerah; dan *keenam* melemahkan kekuatan masyarakat sipil. Secara umum penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi kekuatan informal seperti bosisme lokal terbukti masih dapat berkuasa seiring dengan keberlanjutan agenda-agenda tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah. Selain itu kekuatan bosisme lokal terbukti mampu menunjukkan resiliensi kendati mendapati sejumlah rintangan institusional dalam proses menyokong kompetisi elektoral di era demokrasi.

Kata Kunci: Bosisme lokal, elektoral, pilkada, korupsi

ABSTRACT

This study aims to explain the strength of local bossism which is the background of Syahri Mulyo's victory as a corruption suspect in the 2018 local elections in Tulungagung Regency. Using the main framework of local bossism theory combined with the concept of predatory local elites, this research proves that the victory of a candidate for corruption is not only determined by voter behavior from the community, but more than that due to the power shown by the bosses. In this study, a qualitative method is used with the critical inquiry paradigm that rejects the rationality of society and various institutional innovations to form an electoral pattern, instead of determining the battle patterns of the interests of a handful of elites. Based on that, this study concludes that Syahri Mulyo's victory in the 2018 local elections Tulungagung Regency was caused by, firstly, the operation of the old network of political brokers (*botoh*) in the election; second, control over the grassroots base of the party; third, make alliances with business groups as a source of funding; the fourth operation of money politics in elections; fifth, to mobilize the layers of the regional bureaucracy; and sixth, it weakens the power of civil society. In general, this study concludes that the domination of informal forces such as local bossism has proven to be able to power along with the sustainability of the good governance agendas in the regions. In addition, the strength of local bossism has proven to be able to show resilience despite finding a number of institutional obstacles in the process of supporting electoral competition in the democratic era.

Keyword: Local bossism, electoral, local election, corruption